

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap organisasi memiliki sarana yang akan dicapai, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu untuk memperoleh laba, menaikkan nilai perusahaan, dan demi menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka suatu perusahaan memerlukan aset yang dapat menjamin kelancaran operasional rutin perusahaan terutama aset tetap. Dalam perusahaan manufaktur, aktiva tetap merupakan bagian penting dari kelayakan yang dimiliki oleh perusahaan, karena aktiva memiliki proporsi yang terbesar dari kekayaan tersebut.

Aktiva tetap merupakan aset perusahaan yang sangat penting, tanpa adanya aset tetap mustahil sebuah perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasional rutusnya dengan baik. Dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, proses perolehan aset tetap tersebut memerlukan pertimbangan-pertimbangan bagi pihak perusahaan, karena kesalahan dalam mempertimbangkan cara memperoleh aset tetap juga akan mempengaruhi operasi perusahaan, terutama dari segi dana yang tersedia untuk memperoleh aset tetap tersebut, untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tepat bagi para pengambil keputusan, tentang kebijakan apa yang perlu diambil untuk memperoleh aset tetap (Sulastri, 2014,1).

Aset tetap ini digolongkan kepada dua kelompok berdasarkan wujudnya yaitu, aset tetap berwujud (*tangible asset*) dan aset tetap tidak berwujud

(*intangible asset*). Harta perusahaan yang termasuk kedalam kelompok aset tetap berwujud yaitu, tanah (*land*), gedung (*building*), mesin (*machine*), kendaraan (*vehicle*). Sedangkan kelompok aset tetap tidak berwujud yaitu, *goodwill*, hak cipta (*copy rights*), dan lain sebagainya. Aset tetap yang dimiliki perusahaan diperoleh dengan sewa guna usaha pembiayaan disajikan sejumlah nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah harga opsi yang harus dibayar pada akhir periode sewa (Samudra, 2008).

Dalam rangka pengembangan perusahaan, biasanya perusahaan akan selalu berusaha untuk mengganti aktiva yang lama dengan aktiva yang baru. Penggantian atas aktiva yang lama ini mungkin disebabkan karena aktiva tersebut telah habis umur ekonomisnya atau karena rusak dan tidak dapat lagi digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan disisi lain, kegiatan operasional perusahaan menuntut adanya pengadaan aktiva tetap yang baru terutama tanah, gedung dan peralatan. Pengadaan aktiva tetap ini dapat dipenuhi oleh perusahaan dalam bentuk sewa atau *leasing* (Elsyah, 2008).

Penggunaan sewa sebagai sarana mengalihkan hak untuk menggunakan suatu harta kepada pihak lain telah mengalami pertumbuhan yang pesat, hal ini disebabkan semakin menyebarnya jenis aktiva yang dapat disewa mulai dari kendaraan, mesin-mesin, alat berat sampai dengan aset dan teknologi canggih. Hadirnya perusahaan yang menerapkan sewa semakin mempopulerkan dan menambahkan kiprah sewa sebagai sumber pembiayaan lain disamping cara-cara pembiayaan konvensional yang lazim dilakukan melalui perbankan (Sulastri, 2014).

Kegiatan sewa menyewa ini sangat bervariasi menurut kontraknya, variabel-variabel itu misalnya lama persewaan, persyaratan pembayaran dan pembelian, ayat-ayat dan pembatalan sanksi mengenai jaminan oleh penyewa mengenai nilai sisa, jumlah dan waktu pembayaran sewa, tingkat bunga dalam perjanjian sewa menyewa, dan pembayaran biaya-biaya seperti pemeliharaan, asuransi, dan pajak. Hal-hal tersebut harus dipertimbangkan dalam menentukan perlakuan akuntansi yang tepat dalam sewa (Sulastri, 2014).

Kegiatan sewa dikategorikan ke dalam klasifikasi dari segi *lessee* dan *lessor*. Klasifikasi sewa guna usaha terdiri dari sewa pembiayaan (*capital lease*), sewa operasi (*operating lease*), sewa penjualan (*sales type lease*) dan sewa berbagi (*average sales*), jual dan sewa-balik (*sale and lease back*) (Martani, 2012,344).

Melihat semakin berkembangnya sewa guna usaha, maka dirasakan adanya kebutuhan untuk menyediakan Standar Akuntansi Keuangan yang dapat dijadikan pedoman untuk mencatat dan melaporkan transaksi sewa dalam laporan keuangan, sehingga akan dihasilkan suatu laporan keuangan yang wajar dan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan yang berkaitan dengan sewa yaitu PSAK 30 per efektif 1 Januari 2014 disahkan pada tanggal 27 Agustus 2014 dan berlaku efektif 1 Januari 2015 (IAI, 2015,30.1)

Perusahaan jasa konstruksi yaitu PT Sinar Karya Mega Persada juga memiliki aktiva tetap yang dapat disewakan untuk mendapatkan *profit* yang lebih. Untuk itu dalam prosedur penyewaan terlebih dahulu harus ada komunikasi,

konfirmasi, dan kesepakatan antara pihak penyewa dan pemberi sewa. Pencatatan yang dilakukan oleh PT Sinar Karya Persada terlihat bahwa perlakuan akuntansi sewa aktiva tetap tergolong pada jenis sewa operasi (*operating leasing*). Sedangkan dalam pencatatan dan pengungkapan akuntansi sewa yang dilakukan oleh PT Sinar Karya Persada selain aktiva yang disewakan tidak dipisahkan dengan aktiva tetap, juga sewa yang dilakukan oleh perusahaan tidak menyertakan simpanan jaminan dari pihak *lessee* dan mengakui sebagai pendapatan sewa dan pada akhir periode penyewaan *lessor* tidak memberikan aktiva sewaan kepada *lessee* (Pangkerego, 2015,2).

Menurut Hermika (2013,7) bahwa pencatatan yang dilakukan PT Pandu Siwi Palembang Sentosa terdapat kekeliruan pencatatan perolehan aset tetap yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan teori. Pada perusahaan memasukan unsur pembelian aset tetap dan potongan lainnya tersebut diakui sebagai pendapatan lain-lain perusahaan sehingga aset tetap perusahaan diakui dan disajikan terlalu tinggi. Seharusnya potongan tersebut diakui sebagai pengurangan biaya perolehan aset tetap perusahaan.

Perlakuan sewa oleh PT Nusantara menunjukkan bahwa peralatan yang ada termasuk kedalam *capital lease*, karena terdapat pemindahan kepemilikan, masa sewa lebih dari dua tahun, perusahaan memiliki hak opsi pembelian pada masa akhir masa sewa, dan jumlah pembayaran berkala ditambah nilai sisa menutupi harga perolehan aktiva sewa dan keuntungan *lessor*. Akan tetapi dalam pencatatan transaksi sewa oleh perusahaan menunjukkan adanya kesalahan pencatatan dan pengelompokan perkiraan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada metode

penelitian yang digunakan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada klasifikasi sewa yang digunakan (Kombaitan, 2008,1).

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita menyaksikan fenomena yang terjadi dalam masyarakat seperti jual beli, hutang piutang, dan sewa-menyewa. Akad sewa menyewa seperti ini merupakan salah satu contoh dari akad *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa sementara hak kepemilikan aset tetap pada pemberi sewa. Sebaliknya penyewa atau pengguna jasa memiliki kewajiban membayar sewa atau upah. Objek *ijarah* berupa barang misalnya, rumah, gedung, mobil, ruko dan berupa jasa misalnya konsultan proyek dan tenaga pengajar. Para pelaku transaksi terkadang tidak mengetahui dasar-dasar hukum dari apa yang dilakukannya dan dalam Fiqh Muamalah semua itu dipelajari secara rinci. *Ijarah* (sewa menyewa) mempunyai dasar-dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka ketika antara kedua belah pihak yang akan mengadakan transaksi harus dengan dasar-dasar hukum yang jelas. Karena ditakutkan transaksi yang dilakukan merupakan transaksi yang dilarang. *Ijarah* (sewa menyewa) dapat dikatakan sah apabila telah tercapai rukun dan syaratnya (Hidayat, 2011,59)

Terkait pentingnya menggunakan akad *ijarah* dalam perusahaan manufaktur, maka perlu sekiranya untuk mengetahui tentang mekanisme terkait hal tersebut. Mekanisme tersebut harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian guna untuk meningkatkan keefesienan kinerja perusahaan manufaktur (Wasilah, 2013, 232).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan diberi judul “**PENERAPAN PSAK NO. 30 TENTANG SEWA AKTIVA TETAP PADA PT UNITED TRACTOR DAN TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM** (Studi Kasus Pada PT United Traktor Pandu Engineering Pada Tahun 2015)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mencoba merumuskan masalah agar penelitian dilakukan terlebih terarah dan mencapai hasil yang diharapkan. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan PSAK NO. 30 tentang Sewa Aktiva Tetap pada PT United Tractor 2015?
- b. Bagaimana penerapan PSAK NO. 30 tentang Sewa Aktiva Tetap pada PT United Tractor di tinjau dari sudut pandang Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK NO. 30 tentang Sewa Aktiva Tetap pada PT United Tractor 2015.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK NO. 30 tentang Sewa Aktiva Tetap pada PT United Tractor di tinjau dari sudut pandang Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para pimpinan kantor PT United Tractor Pandu Engineering agar aset tetap yang dimiliki untuk pencatatan dan penilainnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan pengalaman yang berharga dalam menulis karya ilmiah dan memperluas wawasan dalam bidang akuntansi, sehingga dapat diketahui masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan yang berhubungan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK NO. 30).

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi yang diperlukan atau tambahan referensi yang dapat dijadikan bahan perbandingan oleh peneliti lain yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sejenis dan masalah yang sama dimasa yang akan datang.